

BAB IV

ANALISA RIVALITAS ARAB SAUDI-IRAN DI YAMAN

ERA ARAB SPRING 2010-2016

Musim Semi Arab (Arab Spring) telah membawa perubahan signifikan kawasan di Timur Tengah. Kejatuhan rezim di beberapa negara yang dilanda Arab Spring menghadirkan peta politik baru yang mengundang perhatian khusus dari Arab Saudi dan Iran. Sebagai dua negara berpengaruh di kawasan tersebut, Saudi dan Iran ikut terusik dengan pergolakan yang terjadi selama Arab Spring. Perubahan konfigurasi politik di negara-negara yang dilanda Arab Spring turut berimbas pada kepentingan dua negara tersebut dalam mengejar prioritas kebijakan luar negeri mereka di kawasan.

Sebagaimana disampaikan di bab sebelumnya, Arab Saudi dan Iran senantiasa bersaing memperebutkan pengaruhnya di kawasan. Perubahan besar yang dilahirkan gelombang Arab Spring ini berpotensi menggeser peta perebutan pengaruh mereka di kawasan, perubahan anasir-anasir tersebut menghadirkan celah baru bagi kedua negara berpengaruh untuk memperbesar pengaruh mereka.

Atas dinamika politik baru yang berkembang di kawasan tersebut, Saudi dan Iran tak tinggal diam. Mereka banyak melakukan “investasi” di negara-negara yang tengah bergejolak. Ada pola menarik ketika kita mengkaji rivalitas keduanya di kawasan pasca musim semi Arab ini, yaitu, Arab Saudi cenderung berada di pihak yang mempertahankan status quo, sedangkan Iran mendukung kelompok penantang.¹⁹³ Pola ini berlaku nyaris di semua negara yang dilanda

konflik, kecuali Suriah dimana kondisinya berbalik. Arab Saudi melihat kejatuhan rezim penguasa di Mesir, Tunisia, dan Yaman dengan kekhawatiran, sementara pemimpin Iran melihat peristiwa tersebut dengan antusias, mereka menyambut baik perubahan rezim ini sebagai peluang untuk penyebaran pesan revolusioner Islam yang tengah menemukan momentumnya untuk merekah. Iran melihat pergolakan politik yang terjadi ini sebagai kekalahan bagi AS dan kebangkitan gerakan Islam yang membebaskan di Timur Tengah, tak terkecuali di Yaman. telah merubah konfigurasi politik di internal Yaman dimana kelompok Syiah mendapatkan momentum untuk mengakses kuasa. Jika di biarkan, perubahan konfigurasi politik Yaman ini turut menggeser peta rivalitas pengaruh Saudi dan Iran di kawasan.

Sebagaimana disampaikan dalam pembahasan sebelumnya, Houthi berhasil menguasai Sana'a dan mendeklarasikan pemerintahan revolusi Yaman. Keberhasilan Houthi ini didapat setelah mereka melakukan serangkaian aksi penentangan terhadap pemerintah Hadi. Pada 18 Agustus 2014, Houthi melakukan serangkaian demonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar. Pada 21 September, pasukan Houthi berhasil menguasai Sana'a, setelah Perdana Menteri Mohammed Basindawa mengundurkan diri dan pimpinan Houthi berhasil menggalang kesepakatan dengan partai politik lainnya untuk membentuk gabungan pemerintahan baru. Aksi protes ditandai dengan bentrokan antara milisi Houthi dengan pemerintah, selain itu juga pecah bentrok antara Houthi dengan Alqaeda in The Arabian Peninsula (AQAP).

Setidaknya 340 orang meninggal di pinggiran ibu kota Yaman dalam pertempuran antara pemberontak Syiah ini dengan milisi Sunni sebelum Sana'a akhirnya jatuh ke tangan Houthi. Pemerintah baru di ambil sumpah jabatan pada 9 November, meskipun Houthi dan *General People's Congress* telah menyatakan menolak.

Juru bicara Houthi menuduh Presiden Hadi mempersenjatai Alqaeda di Provinsi Marib, sebuah Provinsi di bagian Timur Yaman, untuk menciptakan krisis keamanan baru.

Ketegangan semakin memuncak setelah milisi Houthi menyerang istana presiden dan kediaman pribadi Presiden Hadi pada Januari 2015. Houthi berhasil mengambil alih sarangnya dan memaksa Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi dan kabinet akhirnya mengundurkan diri pada 22 Januari 2015.

Mansur Hadi meloloskan diri dari tahanan rumah pada 21 Februari dan melarikan diri ke Aden. Hadi menyatakan mengutuk aksi pengambil alihan kekuasaan oleh Houthi, Ia juga menarik kembali pengunduran dirinya, dan berupaya membentuk kembali pemerintahanya. Menyusul kemudian, Hadi juga mengumumkan Aden sebagai Ibu Kota sementara Yaman.

Pada 19 Maret, Hadi memecat Abdul Hafezh al-Saqqaf, seorang Jenderal yang disinyalir merupakan loyalis mantan Presiden Ali Abdullah Saleh—yang dipercaya beraliansi dengan Houthi. Keputusan Hadi ini memicu pertempuran yang pecah di Bandara Internasional Aden. Sehari berikutnya, terjadi ledakan oleh bom bunuh diri yang mengguncang dua masjid di Sana'a dimana ratusan penganut Houthi tengah beribadah disana. Merespon peristiwa ini, The

Revolutionary Committee memerintahkan militer untuk melancarkan serangan ke basis Hadi yang diduga bekerjasama dengan Al Qaeda.

Sejak pertempuran di bandara dan serangan Houthi, media mulai mendeskripsikan situasi darurat di Yaman dan menyebut eskalasi konflik antara dua pihak yang saling klam sebagai pemerintahan yang sah ini sebagai perang sipil.

Dengan kondisi yang makin terdesak, Mansur Hadi meminta bantuan Arab Saudi dan sekutu dekat lainnya untuk membantu mengatasi lawan-lawanya. Beberapa negara dibawah pimpinan Arab Saudi kemudian merespon permintaan Hadi ini dengan menurunkan intervensi militer, operasi yang diberi nama "*Operation Decisive Storm*". Koalisi pimpinan Saudi ini membombardir basis Houthi dan menghantam Houthi dengan serangkaian serangan udara.

Keputusan Saudi untuk melakukan intervensi militer ini menarik untuk dicermati. Selain lantaran pergolakan di Yaman ini merupakan dinamika politik internal negara tersebut, sejatinya kebijakan luar negeri Saudi selama beberapa dekade ini lebih menekankan pada pendekatan dialogis daripada intervensi langsung.

Sikap Saudi tersebut akan terlihat kontekstual jika dilihat dari perspektif rivalitas antara tuan rumah tetap penyelenggaraan ibadah haji tersebut dengan Iran, rival utamanya di kawasan. Selanjutnya, bab ini akan mengelaborasi lokus pertarungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Rivalitas Arab Saudi dan Iran.

A. Lokus Rivalitas Arab Saudi-Iran di Yaman

Rivalitas Saudi dan Iran merupakan persaingan dalam memperebutkan pengaruh di kawasan. Rivalitas ini meluas dan melibatkan negara lain sebagai medan pertarungan. Dalam studi hubungan internasional dikenal konsep *sphere of influence* yang dimaknai sebagai klaim dari sebuah negara secara eksklusif atau kontrol yang dominan atas sebuah area atau wilayah asing diluar wilayah yurisdiksinya. Istilah ini mengarah pada klaim politis untuk kontrol yang eksklusif dimana negara lain tidak akan mengakui, atau akan mengarah pada perjanjian hukum dimana negara lain akan menahan diri untuk tidak mengintervensi didalam lingkaran pengaruh yang ada.

Istilah ini mulai populer sejak tahun 1880an ketika ekspansi koloni dari Eropa masuk ke Afrika dan Asia. Dalam catatan sejarah, perebutan *sphere of influence* terjadi dalam beberapa episode yang selalu melibatkan pertarungan dua kekuatan dominan.

Pada abad 18, Inggris terlibat perebutan daerah pengaruh yang memperebutkan teluk guinea. Pertarungan ini berujung pada perjanjian antara Inggris dan Jerman pada bulan Mei 1885 yang memutuskan batasan dari pengaruh kedua negara tersebut atas teluk guinea. Perjanjian ini kemudian diikuti oleh beberapa lainnya, yang mana ada pasal VII dari perjanjian antara Inggris dan Jerman pada tanggal 1 Juli 1890 tentang Afrika Timur yang bisa dikatakan serupa. Isinya sbb: Kedua kekuatan tidak akan mengintervensi satu sama lain sebagaimana yang telah disebutkan ada pasal 1-4. Satu kekuatan tidak akan berada pada lingkaran pengaruh kekuatan lain

dalam mengakuisisi, membuat perjanjian, mengakui hak atau perlindungan, ataupun menghalangi perluasan pengaruh dari yang lain.

Pada masa lampau, konflik antara Roma dan Carthage untuk pengaruh atas Mediterania barat berujung pada Perang Punic yang dimulai pada abad ketiga. Sedangkan di masa perang dingin, Amerika Serikat terlibat dalam perebutan daerah pengaruh yang terjadi di banyak negara terutama di kawasan Asia.

Dalam perebutan daerah pengaruh selalu melibatkan dua kekuatan dominan yang saling bertarung memperebutkan satu atau beberapa wilayah, dan negara satelit yang sering kali menjadi medan pertarungan dua kekuatan dominan tersebut.

Merujuk pada konsep daerah pengaruh tersebut, Rivalitas antara Kerajaan Arab Saudi dan Iran di Yaman merupakan representasi mutakhir dari perebutan daerah pengaruh di kawasan teluk. Perubahan rezim di Yaman bisa menggeser peta daerah pengaruh Saudi dan Iran, dalam hal ini Yaman yang sebelumnya berada dibawah pengaruh Saudi, terancam dengan peristiwa pendudukan Houthi yang mendeklarasikan Dewan Revolusi.

Houthi merupakan organisasi yang di gerakkan oleh kelompok Zaidi, sebuah cabang dari Syiah yang mempunyai penganut cukup banyak di Yaman. Jumlah penganut Zaidi mencapai 45% dari total populasi di negara

tersebut, sedangkan yang terafiliasi dalam gerakan Houthi berkisar sekitar 30% dari total populasi. Sejak mencatat, Zaidi memerintah negeri Yaman (Utara) selama 1.000 tahun lebih sampai tahun 1962. Selama periode tersebut, mereka mempertahankan kemerdekaan dengan tangguh dan banyak terlibat dalam pertempuran melawan kekuatan-kekuatan asing yang pada saat itu mengendalikan wilayah Yaman bagian selatan.

Pendekatan dan strategi gerakan Houthi dalam banyak hal disinyalir mirip dengan Hezbollah di Lebanon, gerakan yang juga berbasis pada aliran yang sama dan didukung Iran. Keduanya mempunyai doktrin militer dan imaji perjuangan yang sama yang berkiblat pada revolusi Iran. Sebagai konsekuensinya, Houthi sering kali di tuduh berafiliasi dan didukung oleh Iran.¹

Houthi sendiri menegaskan bahwa gerakan mereka merupakan reaksi perlawanan terhadap ekspansi salafiyah di Yaman, sekaligus sebagai upaya membela komunitasnya dari diskriminasi yang dilakukan rezim penguasa. Pemerintah Yaman menuduh pemberontakan Houthi bertujuan untuk mendestabilkan pemerintahan, menggulingkan rezim dan menggantinya dengan hukum agama yang dianut Zaidi. Pemerintah juga menuding bahwa Houthi mempunyai keterikatan dengan kekuatan pendukung di luar, dalam hal ini pemerintah Iran.

Naiknya Houthi telah merubah konfigurasi politik di internal negara Yaman dimana kelompok Syiah mendapatkan momentum untuk mengakses

¹"[Houthis seek to impose a new reality on Yemen](http://www.thenational.ae/opinion/houthis-seek-to-impose-a-new-reality-on-yemen)". *The National*. 23 September 2014.<http://www.thenational.ae/opinion/houthis-seek-to-impose-a-new-reality-on-yemen>

kuasa. Houthi—yang mempunyai kedekatan ideologis dan diduga berafiliasi dengan Iran, akan mengurangi radius pengaruh Arab Saudi di satu sisi, dan memperluas daerah pengaruh Iran di sisi lain. Meski merupakan negara miskin, namun Yaman merupakan negara yang mempunyai kepadatan cukup tinggi dengan populasi lebih dari 25 juta penduduk. Jika dibiarkan, perubahan konfigurasi politik Yaman ini berpotensi menggeser peta rivalitas pengaruh Saudi dan Iran di kawasan. Mempertimbangkan hal tersebut, maka reaksi keras Saudi terhadap pergolakan di Yaman bisa di pahami.

Belum lagi jika mempertimbangkan faktor geografis, Yaman merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Keduanya mempunyai garis perbatasan darat yang cukup panjang yaitu di bagian selatan Arab Saudi dan wilayah utara Yaman. Yang tak kalah menarik untuk di catat dalam hal ini adalah, wilayah utara Yaman ini merupakan salah satu basis utama Houthi.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Rivalitas Saudi-Iran di Yaman

Untuk mengkajilebih jauh pertarungan pengaruh Arab Saudi dan Iran di Yaman, selain mengacu pada sejarah politik dan tren kebijakan luar negeri saat ini di Timur Tengah, penting juga untuk mengelaborasi faktor-faktor yang mempengaruhi rivalitas kedua negara. Banyak pengamat yang melihat persaingan antara Arab Saudi dan Iran cenderung di pengaruhi oleh

berbagai perbedaan antara keduanya yang mencakup: Sektarianisme, nasionalisme, ideologi revolusioner, persaingan atas hegemoni regional, politik perdagangan minyak, kebijakan terhadap kehadiran AS di Teluk, dan perselisihan haji.

Berbagai perbedaan identitas politik ini cukup fundamental dalam menjelaskan persaingan Saudi-Iran, pasang surut hubungan antara kedua negara, dan perubahan-perubahan pendekatan dalam kebijakan luar negeri keduanya. Politik identitas di sini mengacu pada anasir-anasir yang mencakup seputar identitas etnis, ras atau agama yang bisa dipakai sebagai klaim yang melegitimasi pemegang kekuasaan dalam memutuskan arah kebijakan negara. Anasir-anasir yang dimaksud melingkupi faktor ideasional dan material yang menunjukkan bagaimana perubahan identitas negara—terutama dalam wacana kebijakan luar negeri resmi—tampak mempengaruhi perubahan kebijakan, dan pergeseran pola persahabatan-permusuhan antara kedua negara.²

Penting untuk dicatat bahwa sebuah negara bisa terdiri dari tiga komponen struktural utama: 1) komponen ideasional, yang mencakup cita-cita luhur yang melandasi usaha pemenuhan fungsi dasar pemerintahan untuk menyediakan perlindungan dari ancaman internal dan eksternal, menghadirkan tertib aturan dan menyediakan kebutuhan pokok hidup; 2) Komponen Kelembagaan, yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif yang mengatur sistem dan hukum dasar, prosedur dan norma-norma; 3)

²Mary Kaldor. *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era*. (Stanford, CA: Stanford University Press, 2007), 80

komponen fisik, yaitu populasi yang menyediakan potensi sumber daya yang dapat dimobilisasi melalui pembangunan ekonomi dan memberikan kontribusi untuk negara dengan menyediakan modal manusia. Komponen fisik ini juga termasuk wilayah suatu negara dan semua alam resources.³

Identitas kolektif menyediakan individu dengan informasi yang mereka butuhkan dalam untuk membentuk opini tentang diri mereka sendiri dan lainnya. Selain itu, identitas terbentuk dalam kaitannya dengan dan dari interaksi dengan lainnya. Proses identifikasi identitas kolektif ini berjalan secara berkelanjutan melalui anasir negatif dan positif dan menentukan posisi pandang dalam melihat yang lain. Konsepsi identitas politik menjadi batasan dalam melihat yang lain sebagai liyan atau sebagai bagian dari Identitas yang sama. Identitas kolektif juga memberikan kerangka acuan yang menjadi penuntun arah dalam menentukan posisi, sikap, dan tindakan yang akan diambil. Dalam wilayah negara, identitas negara mempengaruhi kebijakan luar negeri dan sebaliknya, kebijakan luar negeri pada titik tertentu dapat mempengaruhi identitas negara. Dengan demikian, elit politik yang berkuasa dapat memanipulasi politik identitas untuk membenarkan kebijakan termasuk perang.

Politik identitas di Timur Tengah berbeda dengan kebanyakan kawasan lain. Di Timur Tengah, selain faktor kesukuan, politik identitas banyak di pengaruhi oleh isu-isu sektarianisme atau apa yang di sebut

³Barry Buzan, *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. ECPR Classics (Colchester: ECPR Press, 2007), pgs. 83-88

Ashabiyah. Dalam hal ini, Arab Saudi mendasarkan negaranya pada Islam Sunni, sedangkan Iran merupakan negara representasi Islam Syiah.

Untuk memahami sejauh mana faktor *ashabiyah* yang menjadi identitas politik kedua negara ini melatari dan mempengaruhi konflik keduanya, kita perlu untuk melacak kembali konteks historis hubungan sunni-syiah. Ada banyak pengamat yang melihat konflik keras yang ditandai dengan perpecahan yang mendalam dan klasik perseteruan antara Sunni dan Syiah dapat ditelusuri kembali dengan melacak kembali masa awal eksistensi Islam itu sendiri. Konflik Sunni-Syiah adalah perpecahan politik dan agama yang berasal mula dari hari ketika Nabi Ummat Islam Muhammad wafat pada 632 M. Wafatnya pemimpin agama dan politik yang tanpa meninggalkan wasiat ini memunculkan perdebatan tentang pewaris sah tahta Islam.

Sebagian ummat berasumsi bahwa kepemimpinan Islam harus dilanjutkan oleh seorang yang memiliki garis darah dengan Muhammad, sebaian lainnya beranggapan suksesi kepemimpinan tak mutlak harus berdasar pertalian darah. Mereka yang percaya bahwa kepemimpinan harus dilanjutkan oleh seorang yang memiliki ikatan keluarga dengan Muhammad ini mendukung Ali untuk naik tahta dan kemudian dikenal sebagai Syiah. Sedangkan mayoritas ummat percaya bahwa Abu Bakar merupakan orang yang paling tepat dan layak meneruskan kepemimpinan Muhammad dan, karena tidak ada instruksi yang tertinggal mengenai hal ini, kepemimpinan harus berdasarkan konsensus pendapat. kelompok mayoritas ini selanjutnya

dikenal sebagai Sunni.⁴⁸ Dari total 1,6 miliar Muslim di dunia, sekitar 1,3 miliar adalah berfaham Sunni dan kira-kira hanya 200 juta yang menganut Syiah.

Sepeninggal Khalifah Utsman, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi Khalifah. Pengangkatan Ali ini menyisakan sebuah persoalan. Para pembaiat Ali disinyalir punya andil besar dalam pembunuhan Utsman. Mereka adalah 600 orang dari Mesir yang menggeruduk kediaman Utsman di Madinah. Atas tindak pembunuhan itu, Aisyah, istri Nabi Muhammad sekaligus kerabat Utsman memimpin pasukan untuk menentang Ali. Ia menuntut agar segera ditegakkan hukum *qishash* (hukuman yang setimpal bagi para pelaku, dalam hal ini membunuh dihukum dibunuh). Perang Jamal tak terelakkan, pasukan Aisyah akhirnya dapat ditaklukkan oleh pasukan Ali.

Selanjutnya datang lagi perlawanan dari Muawiyah bin Abi Sufyan (Gubernur Syam saat itu). Muawiyah menolak berbaiat kepada Ali, lalu Ali dan pasukannya memerangi Muawiyah. Terjadilah Perang Shiffin yang kemudian berakhir dengan *tahkim* (arbitrase).

Dalam perundingan itu, pihak Ali diwakili oleh Abu Musa Al-Asyari dan Amru ibn Ash sebagai wakil Muawiyah. Hasilnya, secara sepihak Amru bin Ash mengangkat Muawiyah sebagai khalifah setelah sebelumnya berhasil meminta Ali dan Muawiyah turun jabatan untuk sementara.

Kaum muslimin pun terpecah menyikapi hasil arbitrase yang tidak adil itu. Di antara mereka ada ribuan pengikut Ali yang menolak *tahkim* dan

keluar dari barisan Ali. Mereka dikenal sebagai kelompok Khawarij yang ekstrem. Atas makar kaum Khawarij inilah Khalifah Ali terbunuh. Suasana makin runyam. Dengan pertimbangan agar umat Islam bersatu, Hasan putra tertua Ali tidak bersedia diangkat menjadi Khalifah meski banyak yang meminta. Dengan demikian, Muawiyah dikukuhkan sebagai Khalifah. Tahun 60 H, Muawiyah wafat. Sebelumnya ia telah menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah dengan ibu kota kekhalifahan Syam (Suriah). Sementara di Madinah, Hussein yang merupakan adik Hasan sekaligus cucu Nabi Muhammad SAW menerima 500 pucuk surat lebih dari orang-orang Kufah (Irak) yang menyatakan akan membaiainya sebagai khalifah.

Di Kufah, banyak orang yang sangat menginginkan Hussein menjadi khalifah. Mereka telah membaiait Hussein melalui perantara Muslim bin Aqil. Atas permintaan itu Hussein berangkat ke Irak. Yazid mendengar kabar itu. Ia mengutus Ubaidullah bin Ziyad menuju Kufah untuk mencegah Hussein masuk ke Irak dan meredam pemberontakan penduduk Kufah terhadap otoritas kekhalifahan. Pada hari kesepuluh bulan Muharram, Hussein beserta pengikutnya sampai di daerah Karbala.

Tibalah 4.000 pasukan yang dikirim oleh Ubaidullah bin Ziyad dengan pimpinan pasukan Umar bin Saad. Terjadilah peperangan yang sangat tidak imbang antara 73 orang di pihak Hussein dengan 4.000 pasukan Irak. Seluruh pengikut Hussein tewas, tinggalah Hussein seorang diri. Hussein pun gugur dengan mengenaskan. Peristiwa itu dikenal dengan

tragedi Karbala. Sebuah peristiwa yang tiap tanggal 10 Muharram diratapi dan didramatisasi hingga kini oleh pengikut Syiah. Dari peristiwa Karbala inilah kaum Syiah membangun basis ideologi mereka. Tiap tahun kematian Husein diperingati dengan ritual tahunan hari *As-Syura* yang berpusat di Iran. *Asyura* bermakna sepuluh (Arab: *'a-sya-ra*), sesuai tanggal kejadian tragedi Karbala.

Sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya, perpecahan ini terus berlangsung dari masa-ke masa, dan melahirkan banyak benturan serta konflik antara kedua aliran terbesar dalam islam ini. Setelah gesekan panjang dan mendalam sejak masa kekhalifahan, kini konflik dua aliran besar dalam Islam tersebut paling tampak berlangsung dalam wujud rivalitas antara dua negara islam, yaitu Arab Saudi dan Iran. Saudi yang mayoritas Sunni dan Iran yang Syiah menjadi representasi mutakhir pertarungan dua aliran ini. Keduanya secara sadar dan tegas saling mengklaim diri dan kebijakan mereka sebagai "negara Islam yang benar." Arab Saudi dan Iran berpendapat bahwa masyarakat dan sistem tata negara mereka didasarkan pada perwujudan nilai-nilai normatif Islam dan bahwa rezim mereka memerintah rakyat atas dasar hukum ilahi dan Syariah, prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah-tradisi Muhammad dan generasi awal umat Islam.

